

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGATASI MASUKNYA KOSMETIK ILEGAL DARI MALAYSIA TAHUN 2015-2019

By: Chyntania Anggreni Laia*

achyntania@gmail.com

Supervisor : Dr. H Tri Joko Waluyo, M.Si

*Bibliography : 9 Journal, 17 Books, 9 Constitution, 3 Thesis, 33 Website, 1 Research
Office.*

Department of International Relations
Faculty of Social and Politics Sciences
University of Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain the strategy of the Indonesian government in overcoming the entry of illegal cosmetics into Indonesian territory. The entry of illegal cosmetics is due to globalization and free trade which provide wide space for the flow of goods and services transactions that cross the borders of a country. BPOM as the agency authorized to supervise cosmetics in circulation often gets illegal cosmetics circulating in Indonesian territory

The Study uses a qualitative research method, with the level of analysis of the nation state. The author use the theory of Strategy with the concept of Non- Traditional Security using the perspective of Constructivism. To analyze this problem, the authors collected data from books, journals, websites, dictionaries, reports, data from the Drug and Food Monitoring Agencies about illegal cosmetics from Malaysia.

The Finding of this study indicates that the strategy carried out by the Indonesian Government is to control by the BPOM and strengthen the applicable laws. Apart from that, in overcoming illegal cosmetics, Indonesia is also conducting regional cooperation as well as international cooperation. The cooperation carried out is security cooperation by strengthening guarding in border areas, as well as working with ASEAN through the Post Market Alert System (PMAS) activity.

Keyword: *Indonesia, Non- Tradisional Security, Illegal Cosmetics, Strategy.*

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1991 mengakibatkan semakin berkembangnya topik bahasan masyarakat internasional. Sebelumnya pembahasan masyarakat internasional hanya terpusat pada kekuatan nasional, keamanan dan kedaulatan negara saja, kini beralih ke topik pembahasan yang lebih luas lagi. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan pada dunia global, yang juga berpengaruh pada semakin berkembangnya permasalahan yang ada pada dunia global saat ini. Arus globalisasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung, dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akibat globalisasi ini justru tidak hanya memberi kemudahan pada masyarakat saat ini namun juga memberi problematika baru seiring dengan berubahnya system nilai dalam masyarakat. Karena globalisasi juga mengarah kepada liberalisasi, dimana terjadinya liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara. Liberalisasi pasar ini memberi manfaat pada aktor-aktor perdagangan dimana perdagangan semakin terbuka dan memberi keuntungan ekonomi yang pesat juga bagi aktor-aktornya. Dengan adanya liberalisasi perdagangan ini mengakibatkan munculnya ketergantungan antarnegara dalam kegiatan perdagangan internasional.

Faktor-faktor yang menjadi penggerak dalam globalisasi ekonomi diantaranya adalah kemajuan dibidang teknologi, ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga negara akan mudah dalam melakukan perdagangan

lintas negara, dan yang terpenting adalah kebijakan liberalisasi yang diterapkan oleh pemerintah negara-negara nasional (*nation-state*).¹ Dalam kenyataannya liberalisasi ini tak hanya memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negative yang cukup berpengaruh pada suatu negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut merasakan dampak negatifnya. Meskipun aksi perdagangan internasional diatur dalam sebuah hukum perdagangan internasional, namun masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut. Masih banyak pelaku yang melakukan perdagangan ilegal yang memberikan kerugian besar pada negara.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan negara dengan letak geografis paling strategis. Dimana terletak diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan juga terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Letak strategis Indonesia ini pula yang mengakibatkan semakin banyaknya bermunculan kasus kejahatan transnasional.

Kasus kejahatan transnasional yang sering terjadi seperti kasus penyelundupan, baik itu penyelundupan manusia, obat-obatan, kosmetik maupun senjata dan dengan kata lain juga disebut perdagangan ilegal. Dimana hal ini memberi dampak yang besar bagi negara, baik dari segi kerugian ekonomi, juga memberikan ancaman keamanan. Penyebab lain juga mengapa kejahatan transnasional ini menjadi ancaman keamanan itu dikarenakan

¹ Aprilia Restuning Tunggal, *Ilmu Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal.37.

adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kosmetik ilegal yang masuk ke Indonesia sangatlah beragam jenisnya. Jenisnya mulai dari pensil alis, parfum, lotion, krim wajah, sabun, masker wajah, lipstick dan berbagai jenis kosmetik lainnya. Masuknya berbagai macam kosmetik ilegal ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh. Salah satu dampak yang diberikan ialah kerugian dan ketidakstabilan ekonomi. Karena berpengaruh pada pendapatan pajak yang diterima oleh negara, juga memberi ancaman keamanan karena barang yang masuk melintasi batas negara dan mengganggu stabilitas keuangan negara. Akibat dari banyaknya kosmetik ilegal yang masuk ini, menyebabkan produsen kosmetik dalam negeri mengalami kerugian dan berakibat juga pada matinya produksi kosmetik dalam negeri.

Kosmetik ilegal yang masuk tidak memiliki izin dan dokumen yang resmi, sehingga juga mempengaruhi pendapatan pajak negara. Selain itu masuknya dan beredarnya kosmetik ilegal ini juga berpengaruh pada konsumen. Produk kosmetik ilegal yang masuk, kebanyakan terbuat dari bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, logam berat dan bahan berbahaya lainnya yang berdampak pada kesehatan pengguna. Dimana menurut BPOM akibat dari pemakaian yang terus menerus juga akan berakibat pada penyakit yang fatal seperti kanker dan gagal ginjal.²

²<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>. Pada tanggal 26 November 2019. Pukul 13:16 WIB.

Perspektif Konstruktivisme

Teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat atau memperlihatkan. Definisi dari teori ialah pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi dan mungkin juga meramalkan berulangnya kejadian. tersebut dimasa depan.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif konstruktivisme. Alexander Wendt berpendapat bahwa pendekatan konstruktivis mampu untuk mengikuti dinamika perubahan struktural yang mana dimulai dengan aktor dunia politik yang paling menonjol.⁴

Alexander Wendt menyatakan bahwa konstruktivisme adalah suatu teori politik struktural yang memiliki tiga klaim utama, yaitu: pertama, negara merupakan aktor utama dalam sistem; kedua, struktur utama dalam sistem kenegaraan lebih bersifat intersubyektif disbanding material; dan ketiga, identitas dan kepentingan nasional sebagian besar dikonstruksikan oleh struktur-struktur tersebut disbanding ditentukan secara eksogen oleh sifat manusia dan politik dalam negeri.⁵

Teori Decision Making

Teori yang relevan yang akan digunakan dalam menjelaskan strategi yang diambil pemerintah Indonesia dalam masalah penelitian ini adalah teori pengambilan keputusan atau

³ Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta:LP3ES. 1990) Hlm. 185

⁴ Perspektif-perspektif dalam hubungan Internasional diakses pada 3 Oktober 2020, melalui www.teori2hi.multiply.com/journal.

⁵ Alexander Wendt, *"Identities and Structural Change in International Politics"*, dalam Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. (Malang: Intrans Publishing. 2016). hlm.95

decision making theory. Perancangan strategi tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal emosional, tetapi didasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan.

Dalam proses pengambilan keputusan terdapat lima elemen penting seperti yang dipaparkan oleh Afinotan dalam karyanya *Decision Making in Internasional Relations: A Theoretical Analysis*, yaitu :⁶

- a) *The Decision Situation*, ini melibatkan karakter objektif dari lingkungan yang esensial dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat berupa faktor internal atau eksternal, manusia atau bukan manusia, bahkan situasi dimana sang pengambil keputusan merasa tertekan atau tidak.
- b) *Decision Participant*, terkait latar belakang para actor kunci dalam proses pengambilan keputusan seperti, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan nilai yang dianut. Disini perlu mempertimbangkan persepsi dan kemampuan para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- c) *Decision Organization*, berputar pada kontes dimana keputusan diambil. Unit-unit atau sub-unit apa saja yang terlibat, juga peran tugas, fungsi pokok yang ditugaskan untuk unit tersebut.
- d) *The Decision Process*, yang menyentuh berbagai teknik dan strategi untuk sampai pada

⁶ Afinotan L Andy *Decision Making in Internasional Relations: A Theoretical Analysis*, Jurnal Social Science Canada Vol.10, No.5 (Canada: 2014).

keputusan. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dari tiap peserta, informasi yang tersedia serta motif atau motivasi apa yang mungkin mereka miliki.

- e) *The Decision Outcome*. Ini mengenai hasil akhir atau totalitas keputusan dari proses pengambilan keputusan dan melibatkan semua aspek dan konsekuensi dari proses ini.

Konsep Keamanan Non-Tradisional

Konsep keamanan dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan eksistensi diri (survival) dalam menghadapi ancaman yang nyata (existencial threat).⁷ Setelah berakhirnya perang dingin memberikan pemahaman yang berbeda mengenai keamanan. Defenisi keamanan mengalami perluasan dan dibagi menjadi dua dalam pemahamannya, yaitu keamanan tradisional dan keamanan non tradisional.

Keamanan menurut Barry buzan dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu atau kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan ataupun tidak sesuai. Dalam defenisinya ancaman merupakan sebuah aksi, upaya ataupun kegiatan yang dinilai bisa mengancam ataupun membahayakan, baik itu membahayakan kedaulatan

⁷ Barry Buzan, dkk, *Security A New Framework for Analysis* dalam Genewati Waryandari dkk, "keamanan di Perbatasan Indonesia-Timur Leste, Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm.27

suatu wilayah dan keselamatan segenap masyarakat. Ancaman bisa datang dari dalam maupun luar wilayah. Ancaman terbagi atas ancaman militer, ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi dan ancaman ekologi.

Meskipun level keamanan tidak dapat diukur secara pasti, terdapat beberapa aspek yang sering dikategorikan sebagai elemen pendukung keamanan nasional yaitu, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan teknologi, sistem politik yang mendapatkan legitimasi, populasi yang homogen, sekutu yang kuat, perbatasan laut dan darat dengan negara yang bersahabat, perdagangan bebas, kemiripan budaya dengan negara-negara sekitar dan sistem kesejahteraan rakyat yang stabil ditingkat domestic.⁸

Level Analisa

Untuk menjelaskan permasalahan menuju sebuah hipotesa penulis menggunakan level analisa nation-state (negara-bangsa).⁹ Level analisa bangsa memfokuskan pada perilaku bangsa-bangsa yang dinilai masih relevan dengan fenomena hubungan internasional saat ini, walaupun terdapat perkembangan pelaku (actor) dalam hubungan internasional. Negara masih merupakan aktor utama dalam penentuan tindakan negara yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Negara merupakan aktor didalam hubungan internasional yang memiliki kepentingan nasional (national interest).

Pembahasan

Menurut Ondri Dwi Sampurno selaku Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, dalam pendefenisian, kosmetik ilegal terbagi menjadi dua jenis yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan juga kosmetik palsu.¹⁰ Kosmetik yang tergolong dalam kosmetik TIE ialah kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan untuk kosmetik palsu ialah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dimana dalam pembuatannya, kosmetik menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. Sering dijumpai bahwa kosmetik ilegal yang beredar merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Kosmetik ilegal ini sangat berbahaya karena tidak terjamin mutu keamanan dan manfaatnya dikarenakan belum melalui proses penilaian dari BPOM.

Berdasarkan Public Warning / Peringatan dari Badan POM Nomor: KH.00.01.43.2503 tanggal : 11 Juni 2009, beberapa senyawa berbahaya yang dijumpai dalam kosmetika antara lain adalah : ¹¹

1. Merkuri (HG) Air Raksa
2. Hidrokinon
3. Asam Retinoat / Tretinoin / Retinoid Acid

⁸ Ibid, hal 308

⁹ Paul R. Viotti Dan Mark V. Kauppi, *International Relations And World Politics Security, Economy, Identity*. New Jersey: Prentice.

¹⁰ <https://www.femina.co.id/Trending-Topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak- diakses pada tanggal 22 April 2020 Pukul 22:17 WIB>

¹¹ <https://www.pom.go.id/public-warning.nomor:KH.00.01.43.2503, diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pada pukul 22:22 WIB>

4. Bahan pewarna merah K3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K1 (C1 12075).

Menurut BPOM RI, data untuk kosmetik ilegal dari Malaysia periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :¹²

Tabel 1.1 Data kosmetik ilegal dari Malaysia Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Kosmetik Ilegal (Item)	Nilai Ekonomi (Rp)
1	2015	1.571	65.572.000
2	2016	62	2.630.000
3	2017	4.554	129.791.000
4	2018	41.570	494.925.000
5	2019	182	9.960.000
Jumlah		47.393	699.878.000

Sumber : Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) RI 2020.

Kosmetik ilegal dimasukkan melalui beberapa cara yaitu : ¹³

- a. Melakukan penyelundupan produk ilegal diantara produk legal.
- b. Pemasukan produk ilegal melalui barang bawaan/ kiriman pribadi secara simultan
- c. Impor produk ilegal dengan menggunakan dokumen palsu.

Jalur masuk kosmetik ilegal dari Malaysia yang sering digunakan ialah melalui daerah-daerah perbatasan yaitu : ¹⁴

- a. Kalimantan Barat : Entikong, Jagoi Babang, dan Segumon
- b. Kepulauan Riau : Pulau Karimun, Pulau Batam, dan Pulau Bintan
- c. Kalimantan Utara : Nunukan dan Tarakan

Memperkuat Regulasi Hukum

Memperkuat regulasi hukum yang ada merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi masalah kosmetik ilegal ini. Cara ini merupakan cara yang paling fundamental. Dengan adanya hukum yang mengatur, maka akan semakin mudah untuk menjerat para pelaku yang dengan sengaja memproduksi ataupun mengedarkan kosmetik ilegal. Diharapkan dengan adanya hukum yang jelas dapat mengatasi masalah kosmetik ilegal di Indonesia.

Dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal, diatur dalam Permendag No 87 tahun 2015. Selain itu UU RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menjadi salah satu hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah kosmetik ilegal. Undang undang ini merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh BPOM untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik ilegal.

Pengoptimalisasian Kinerja BPOM

Salah satu strategi Indonesia dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal ke Indonesia ialah dengan membentuk Badan POM sebagai badan yang berwenang mengawasi produk kosmetik yang masuk. BPOM memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan

¹² Berdasarkan Riset dengan Bayu Wibisono, S.Si, Apt. Koordinator PPID Badan POM RI.2020

¹³ Berdasrkan Riset dengan Bayu Wibisono, S.Si, Apt. Koordinator PPID Badan POM RI.2020.

¹⁴ Berdasarkan Riset dengan Bayu Wibisono, S.Si, Apt. Koordinator PPID Badan POM RI.

memiliki kredibilitas professional yang tinggi.¹⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus mengoptimalisasikan kinerjanya di seluruh daerah dalam pencegahan serta pemberantasan peredaran kosmetik ilegal. Tugas BPOM ialah menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dan Sinergisme antar Stakeholder

Selain hukum yang jelas dan optimalisasi kinerja BPOM, dalam mengatasi kosmetik ilegal juga didukung oleh koordinasi dan sinergisme antar lembaga terkait. BPOM merupakan badan yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemusnahan kosmetik yang terbukti ilegal, namun perlu didukung juga oleh lembaga lainnya yang terkait. Salah satunya ialah penjagaan barang masuk didaerah perbatasan.

Perbatasan merupakan salah satu pintu masuk bagi barang ataupun kosmetik ilegal. Sebagai langkah pencegahan, maka daerah daerah perbatasan merupakan daerah yang perlu penjagaan ketat. Biasanya daerah perbatasan dijaga oleh TNI, sehingga dengan ketatnya penjagaan di perbatasan diharapkan mampu mengatasi masuknya kosmetik ilegal. Selain itu Bea Cukai juga menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengawasi barang masuk dari

luar yang masuk kedalam kawasan pabean.

Kerjasama Indonesia - Malaysia.

Selain melakukan tindakan dari dalam negeri, Indonesia juga mengambil tindakan eksternal dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal dari Malaysia. Salah satunya ialah dengan melakukan kerjasama dengan Malaysia. Dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal dari Malaysia juga diperlukan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Mengingat kosmetik yang masuk berasal dari Malaysia, Indonesia melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam mengatasi hal ini . Salah satunya ialah dengan memperkuat penjagaan di daerah perbatasan masing masing negara.

Kerjasama Indonesia- ASEAN

Dalam merealisasikan harmonisasi ASEAN dibidang kosmetik, dibentuklah Kelompok Kerja Produk Kosmetik (*Cosmetic Product Working Group/ CPWG*), guna mengharmonisasikan Penilaian Kesesuaian dan Regulasi Teknik Kosmetik ASEAN.

Dengan ditandatanganinya Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme, maka CPWG diganti menjadi ASEAN Cosmetic Commite (ACC). Badan ini bertugas dna bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengkaji serta memonitor persiapan dan penerapan AHCRS. Dalam melakukan kajian ilmiah terhadap bahan baku kosmetik, ACC dibantu oleh Asean Cosmetic Scientific Body (ACSB) yang beranggotakan pakar-pakar dibidang kosmetik dari seluruh negara anggota ASEAN.

Selain itu Post Market Alert System merupakan program inisiatif

¹⁵ BPOM, "Latar Belakang" melalui http://www.pom.go.id/pom/profile/latar_bela_kang.php, diakses pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 12:34 WIB

dari ASEAN Pharmaceutical Product Working Group (PPWG) sebagai sarana pertukaran informasi antara negara ASEAN yang berkaitan dengan masalah keamanan, mutu dan kemanfaatan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. PMAS dapat digunakan untuk menotifikasi badan pengawas lainnya secara cepat terutama untuk produk yang dilaporkan termasuk kategori keamanan utama yang harus ditarik dari peredaran.

Produk kosmetik ilegal yang berhasil terjaring dalam PMAS akan dimasukkan kedalam Public warning, kosmetika dengan bahan berbahaya. Dengan adanya kerjasama ini akan memudahkan BPOM dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal. Dari informasi yang didapatkan BPOM dapat dengan cepat tanggap memberi peringatan kepada masyarakat mengenai jenis jenis kosmetik ilegal yang dilarang penggunaannya.

Kesimpulan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam mengawasi kosmetik ilegal ini. BPOM bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum bekerjasama dalam mengawasi kosmetik ilegal yang masuk. Selain mengawasi BPOM juga memiliki wewenang dalam menarik dan memusnahkan kosmetik ilegal dari peredarannya, serta pencegahan peredaran kosmetik ilegal. Selain itu, kuatnya regulasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait permasalahan kosmetik ilegal juga menjadi salah satu strategi yang digunakan pemerintah dalam mengatasi kosmetik ilegal yang masuk.

Selain BPOM dan stakeholder lainnya, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Malaysia. Terutama dalam memperketat penjagaan daerah perbatasan. TNI dan aparat keamanan Malaysia memperketat penjagaan di daerah perbatasan dengan melakukan patroli rutin. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi segala kegiatan ilegal yang kemungkinan terjadi di wilayah perbatasan. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN turut serta dalam Post Market Alert System ASEAN. Dimana kegiatan ini merupakan pertukaran informasi bagi negara-negara ASEAN mengenai kosmetik ilegal yang masuk ke wilayah ASEAN. Kegiatan ini dapat membantu BPOM dalam mengatasi masuknya kosmetik ilegal ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

A'raf, Al. "Dinamika Keamanan Nasional ." *Jurnal Keamanan Nasional Vol.1 No.1*, 2015.

Lumbangaol, Trialen. "Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan di Perairan Selat Malaka)." *JOM FISIP Vol.4 No.1, Februari 2017* .

Ningsih, Sri Rahayu. "Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus Kepulauan Riau)." *JOM FISIP. Vol 5. Edisi II* , Juli-Desember 2018.

Othman. "Non Traditional Security Issues and The Stability of Southeast Asia." *Vol 4 No 2 e-ISSN. 2502 566 X*, 2013.

Pitri, Adek. "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru ." *JOM FISIP Vol.6: Edisi Januari- Juni* , 2019.

Sagena, Uni W. "Memahami Keamanan Tradisional dan Non Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Interaksi Antar Aktor." *Jurnal Interdependence Th.1 Vol.1* , Januari- April 2013.

Siahaan, John Mayer. "Strategi Penanganan Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing) di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016." *JOM FISIP.VOL 4, No 1*, Februari 2017.

Sunandar, Heni Agus. "Penanggulangan Peredaran Gula Ilegal di Luar Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Sarawak Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat ." *Vol. 2, No.2* , ISSN : 0216-2091.

Susetyo, Heru. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia ." *Lex Jurnalica Vol.6 NO..1* , April 2013.

BUKU

Akbar, Husnaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial* . Jakarta : Bumi Aksara , Edisi Kedua. 2014.

Ambarwati dan Wijatmadja, Subarno. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Intrans Publishing, 2016.

Buzan, Barry. *People, States and Fear: an Agenda For International Security Studies in The Post-Cold War*. Boulder: Lyne Rienner Publisher , 1991.

Haynes, Alison. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997.

Hermawan, Yulius P. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu , 2007.

Kauppi, Paul R Viotti and Mark V. *International Relations And World Politics Security, Economy, Identity*. New Jersey : Prentice, 2013.

Latifah, Retno Iswari Trianggono dan Fatma. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* . Jakarta: Gramedia Pustaka , 2007.

Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* . Jakarta : LP3ES, 1990.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Miru, Ahmad. *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya* . Jakarta : PT Rajawali Press, 2004.

Mukhtar, Sidratahta. *Keamanan Nasional : Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia* . 2011.

Plano, Jack C. *Kamus Hubungan Internasional* . Jakarta : Putra Abidin

Sitepu, P. Anthonius. *Studi Hubungan Internasional* . Yogyakarta : Graha Ilmu , 2011.

Sorensen, Robert Jakson dan Georg. *Pengantar Studi Hubungan Internasional : Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi Kelima, 2013.

Suriana, Dewi Muliawan dan Neti. A-Z *Tentang Kosmetik* . Jakarta : PT Gramedia , 2013.

Tunggal, Aprillia Restuning. *Ilmu Hubungan Internasional* . Yogyakarta : Graha Ilmu , 2013.

Wasitaatmadja, Sjarif M. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: UI Press, 1997

UNDANG- UNDANG

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu atau menagndung alkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Permendag Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Permenkes No 1176/ MenKes/ PER/ VIII/ 2010 Tentang Notifikasi Kosmetik

Permenkes Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 1998 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

SKRIPSI

Aditya, Wisnu. "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba." *Yogyakarta*, 2017.

Ananda, M Farid. *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional Dalam Kasus Penyelundupan Barang di Pelabuhan Tanjung Priok*. Depok: Universitas Indonesia , 2012.

Priscilla, Stevany. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Palsu (Studi Pada : BPOM Medan)*. Medan: Universtias Sumatera Utara, 2016

RISET

BPOM RI Jl. Percetakan Negara No.23, RT.23/ RW 7, Johar Baru, kec. Johar

Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560, Jakarta.

WEBSITE

Bantarto Bandoro, Masalah Keamanan Internasional, diakses melalui <https://www.scribd.com/document/22323784/Masalah-Keamanaan-Internasional-Bantarto-Bandoro>

Bahan berbahaya yang ada di produk kecantikan, diakses melalui ¹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3612502/10-bahan-berbahaya-yang-ada-di-produk-kecantikan>

Balai POM di Samarinda berhasil menggagalkan peredaran kosmetik ilegal dari Malaysia, diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18762/Balai-Besar-POM-di-Samarinda-Berhasil-Menggagalkan-Peredaran-Produk-Kosmetik-Ilegal-dari-Malaysia.html>,

Batas Wilayah Negara Indonesia, diakses melalui <https://www.eduspensa.id/batas-wilayah-negara-indonesia/>

Bea Cukai dan BPOM ungkap peredaran kosmetik ilegal dari Malaysia, diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read293084/bea-cukai-bpom-ungkap-peredaran-kosmetik-ilegal-dari-malaysia>,

Beda Kosmetik Ilegal dengan Kosmetik Palsu, diakses melalui <https://www.femina.co.id/Trending-Topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->

BBPOM Banda Aceh Sita 2.542 Kosmetik Ilegal, diakses melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/95412/bbpom-banda-aceh-sita-2542-kosmetik-ilegal>

BPOM Amankan Ratusan Produk Kosmetik Ilegal dari Malaysia dan China Bernilai Miliaran Rupiah, diakses melalui <https://pontianak.tribunnews.com/2018/07/27/bpom-amankan-ratusan-produk-kosmetik-ilegal-dari-malaysia-dan-china-bernilai-miliaran-rupiah>

BPOM Grebek 4 Pabrik Kosmetik Ilegal, diakses melalui <https://www.liputan6.com/health/read/3879822/bpom-gerebek-4-pabrik-kosmetik-ilegal-senilai-rp-30-m-di-jakarta-barat>

BPOM Kepri Amankan Kosmetik Ilegal Rp.168,6 Juta dari 2 Mal, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/08/16/11011611/bpom-kepri-amankan-kosmetik-ilegal-rp-1686-juta-dari-2-mal>

BPOM, Modul Materi Ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil ke Ahli Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPOM, diakses melalui <https://pengawasfarmasidanmakanan.files.wordpress.com/2013/12>

Central Intelligence Agency- The Work Of a Nation. The Center Of Intelligence, diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html>

Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan, diakses melalui <https://dapobas.kemdikbud.go.id>

Harmonisasi ASEAN di Bidang Kosmetika, diakses melalui <https://www.pom.go.id>.

Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, diakses melalui ¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>

Kementerian Pertahanan RI, Doktrin Pertahanan Negara, diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf>

Kerjasama Indonesia dan Malaysia, diakses melalui <https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>

Kewarganegaraan penduduk Indonesia, diakses melalui <https://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html>

Kosmetik Ilegal Kuasai Pasar Masuk Lewat Pelabuhan Tikus, diakses melalui <https://kemenperin.go.id/artikel/4775/kosmetik-ilegal-kuasai-pasar-masuk-lewat-pelabuhan-tikus>

National Crime Justice Reference Service, diakses melalui <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=184773>,

Penyebab obat dan pangan ilegal marak di Indonesia, diakses melalui <https://www.suara.com/news/2015/01/12/173755/ini-penyebab-obat-dan-pangan-ilegal-marak-di-indonesia>,

Public Warning BPOM, diakses melalui <https://www.pom.go.id>

Pulau di Indonesia telah di verifikasi PBB, diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>

Ribuan Kosmetik Ilegal Dari Malaysia –Taiwan Diamankan di Tarakan, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4330173/ribuan-kosmetik-ilegal-dari-malaysia-taiwan-diamankan-di-tarakan>

Setahun, BPOM Sita Kosmetik Ilegal Senilai Total 136 Miliar, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190408223232-12-384433/setahun-bpom-sita-kosmetik-ilegal-senilai-total-rp136-miliar>

Sumiaty Haslinda, Dampak Penggunaan Kosmetik Menggunakan Bahan Berbahaya, diakses melalui <http://www.pom.go.id>,

Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang / Bahan Berbahaya Serta Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat, diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang->

Bahan-Berbahaya-serta-Obat-
Tradisional-Ilegal-dan-
Mengandung-Bahan-Kimia-
Obat.html

The Future of the Global Muslim
population, diakses melalui
<https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/#/Malaysia>

TNI Gandeng aparat Malaysia patrol
amankan perbatasan , diakses
melalui
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180723133054-20-316273/tni-gandeng-aparat-malaysia-patroli-amankan-perbatasan>

TNI perketat penjagaan perbatasan
Indonesia- Malaysia, diakses
melalui
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200621/15/1255452/tni-perketat-penjagaan-perbatasan-indonesia-malaysia>,

TNI TDM sepakat amankan perbatasan
di Kalimantan, diakses melalui
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/19/05/21/pruyco458-tnitdm-sepakat-amankan-perbatasan-di-kalimantan>,

Zat Kimia Beracun dalam Kosmetik,
diakses melalui
<https://www.scribd.com>

Zat Kimia berbahaya Pada Kosmetik,
diakses melalui
<https://deevaskinbeauty.weebly.com/10-zat-kimi-berbahaya-pada-kosmetik.html>,